



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA
SURABAYA
(Studi Kasus : Permukiman Kumuh di sekitar sungai Asemrowo
Surabaya)**

Muhammad Kemal Ghifari (G91219089)
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jl. Ahmad Yani No. 117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya
Kemalghifari27@gmail.com

ABSTRAK

Slums are settlements/housing environments with unfavorable conditions with irregular, dirty, high-density population and building layouts. In big cities in Indonesia, there are still many settlements and slum housing that are unfit for habitation. The cause of the emergence of these slums is the lack of land to build settlements and housing, the high population which then has an impact on the demand for housing needs that are also high, and poverty. Therefore, a policy program is needed which can later be implemented in dealing with slum settlements. In the policy implementation process, there are 4 aspects/variables that can be used, namely program aspects, targets, program implementers, and environmental factors. This research uses a qualitative approach with a case study method. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies for handling slum settlements in Asemrowo Village, Asemrowo District, Surabaya City. In the implementation of policies for handling slum settlements, the Surabaya City government has collaborated with the community and other institutions. However, in its implementation, it experienced disturbances and obstacles such as the old disbursement of funds, the awareness and mindset of the people who were not advanced. The obstacles that occurred made the slum settlement program designed by the government such as KOTAKU (City without Slums) not run properly.

Keywords: implementation, settlements, slums, policies

Abstrak

Permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman dengan kondisi yang kurang baik dengan kondisi lingkungan yang tidak teratur tata letak bangunannya, kotor, kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi. Beberapa Kota besar di Indonesia masih banyak dijumpai permukiman dan perumahan kumuh yang tidak layak huni. Penyebab dari munculnya permukiman kumuh ini adalah lahan untuk membangun permukiman dan perumahan yang sedikit, jumlah penduduk yang tinggi yang kemudian berdampak pada permintaan kebutuhan tempat tinggal yang ikut tinggi juga, dan kemiskinan. Maka dari itu diperlukan program kebijakan yang nanti dapat diimplementasikan dalam menangani permukiman kumuh. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat 4 aspek/variabel yang dapat digunakan yakni aspek program, target, pelaksana program, dan faktor lingkungan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh pemerintah Kota Surabaya sudah bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lain. Namun pada pelaksanaannya mengalami gangguan dan hambatan seperti pencairan dana yang lama, kesadaran dan pola pikir masyarakat yang tidak maju. Hambatan yang terjadi tersebut membuat program penanganan permukiman kumuh yang dirancang oleh pemerintah seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) tidak dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Implementasi, permukiman, permukiman kumuh, kebijakan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk yang meningkat drastis setiap tahunnya menyebabkan timbulnya

permasalahan yakni semakin sedikitnya lahan/tanah kosong di Kota Kota besar. Permasalahan tersebut disebabkan karena permintaan akan kebutuhan tempat tinggal yang tinggi yang berasal dari kedatangan para kaum urban dengan jumlah yang sangat besar. Permintaan tempat tinggal yang tinggi membuat terjadinya kepadatan penduduk yang kemudian berdampak pada keterbatasan lahan, sehingga menyebabkan banyak warga mendirikan tempat tinggal di tempat yang tidak layak untuk dihuni. Tempat tidak layak huni yang ditinggali oleh masyarakat adalah mulai dari pinggir sungai, pinggir rel kereta api, tanah milik pemerintah atau swasta dll. Letak permukiman pada tempat yang tidak semestinya itu menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan banyak ditemui di kota kota besar dengan lingkungan yang padat. Penyebab penurunan kualitas lingkungan berupa wujud bangunan dan tata letak bangunan yang semrawut (tidak beraturan), fasilitas yang tidak memadai adalah pertanda terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Permukiman kumuh sendiri merupakan pemukiman yang tidak layak huni/ditinggali. Adapun ciri ciri permukiman kumuh ini adalah letaknya yang berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk ditinggali, Kepadatan bangunan tempat tinggal yang sangat tinggi, rawan terjadi konflik dan permasalahan sosial, tempat sarang penyakit, kualitas bangunan yang tidak sesuai standar(Kartika Puspa Dewi, 2019). Selain itu ada dampak yang ditimbulkan dari adanya pemukiman kumuh. Peningkatan frekuensi kebakaran, konflik sosial yang tinggi, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat karena tinggal di kawasan yang tidak sehat sehingga berdampak pada kesehatan masyarakatnya.

Sejak dulu permukiman kumuh masih menjadi sebuah masalah yang menghambat laju perkembangan sebuah kota. Laju perkembangan kota yang pesat tentunya membuat pemanfaatan lahan kosong untuk kepentingan bisnis, industri hingga pembangunan infrastruktur membuat daya tarik bagi kaum urbanisasi, sehingga permintaan untuk tempat tinggal menjadi sangat tinggi.

Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia sekaligus ibukota Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota besar tentunya diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yakni sebesar 0,52% . Akan tetapi tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan pemukiman penduduk tidak diikuti dengan ketersediaan lahan atau tempat tinggal yang memadai. Hal tersebut membuat masyarakat dengan penghasilan ekonomi rendah tidak dapat mengakses dan mendapatkan tempat tinggal yang layak sehingga mendirikan bangunan tempat tinggal di kawasan yang tidak layak huni. Permasalahan ini lah yang pada akhirnya menjadi penyebab timbulnya pemukiman kumuh.

Salah satu kawasan permukiman kumuh di Surabaya berada di kawasan Asemrowo. Permukiman yang terletak berada pas di sebelah sungai Asemrowo termasuk ke golongan permukiman kumuh. Hal ini dikarenakan letak rumah penduduk sangat mepet dengan sungai. Selain itu kebiasaan penduduk sekitar sungai yang membuang sampah, limbah rumah tangga langsung ke sungai membuat sungai dan permukiman ini menjadi kotor dan tidak layak untuk ditinggali. Kurangnya pengawasan, penertiban dari pemerintah kota menyebabkan masyarakat dengan seenaknya mendirikan tempat tinggal di kawasan yang dilarang seperti di pinggir sungai. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui kebijakan apa yang akan dibuat dan diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait permukiman kumuh serta bagaimana kebijakan yang dibuat akan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar pemukiman kumuh di Kota Surabaya berkurang dan masyarakat dapat tinggal di tempat layak huni.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Asemrowo, Surabaya

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

Berdasarkan UU no 1 tahun 2011 pengertian Permukiman memiliki fungsi baik sebagai tempat tinggal dan lokasi kegiatan yang terdiri atas satu satuan perumahan, baik di perkotaan maupun pedesaan(Dylan Trotsek, 2017). Standar dan kondisi berikut harus dipenuhi agar suatu lokasi diklasifikasikan sebagai pemukiman yang layak huni yakni :

1. Lahan yang akan dijadikan tempat tinggal harus bebas dari pencemaran baik pencemaran air, udara, suara. Tujuannya agar tempat yang akan ditinggali memiliki rasa aman, nyaman dan hidup sehat terhindar dari penyakit.
2. Lahan yang akan ditinggali/dijadikan pemukiman harus memiliki sistem drainase (saluran air hujan) yang baik agar terhindar dan bebas dari banjir dan memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun permukiman.
3. Lahan yang akan dijadikan tempat tinggal memiliki luas yang cukup dan dilengkapi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana prasarana yang lengkap.
4. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman di atas tanah dan bangunan di sana sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ada kepastian hukum.

2.2 Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU No 1 tahun 2011, definisi permukiman kumuh ialah permukiman yang letaknya berada pada kawasan yang buruk dan tidak layak huni. Hal ini dikarenakan ketidakaturan tata bangunan, tingkat kepadatan tinggi, dan kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat(Kartika Puspa Dewi, 2019) . Permukiman kumuh yang muncul di perkotaan disebabkan oleh

beberapa hal. Seperti masalah sosial yakni terkait sikap dan perilaku masyarakat, infrastruktur, serta penghasilan masyarakat yang rendah (ekonomi). Permukiman kumuh memiliki ciri ciri sebagai berikut :

1. Fasilitas umum dengan kondisi yang tidak memenuhi dan tidak memenuhi syarat
 2. Kondisi tempat tinggal/hunian yang menggambarkan kondisi penghuninya sebagai masyarakat miskin
 3. Tingkat kepadatan yang tinggi.
 4. Tidak teratur (semrawut) kondisi tata bangunan
 5. Masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen
- Masyarakat tersebut memiliki mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beragam.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya permukiman kumuh dapat menjadi masalah yang sulit dituntaskan jika dibiarkan terus menerus. Maka dari itu perlu adanya kebijakan dan peraturan guna menangani permasalahan permukiman kumuh dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan lembaga lembaga masyarakat.

2.3 Urbanisasi

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, urbanisasi didefinisikan sebagai proses peningkatan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selanjutnya, urbanisasi dapat dikatakan sebagai proses urbanisasi tempat dalam ilmu lingkungan. Proses urbanisasi ini dapat dilihat dengan dua cara. Konsep pertama adalah bahwa kemakmuran ekonomi telah menyebabkan perubahan mendasar dalam fitur fisik dan sosial, ekonomi, budaya pada wilayah tersebut. Dari sudut pandang demografi, urbanisasi didefinisikan sebagai proses peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan, yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, yang biasanya diukur dengan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, tingkat di mana proporsi ini berubah, dan perubahan jumlah pusat kota. Berdasarkan perspektif ekonomi politik, urbanisasi adalah pergeseran sosial ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan dan penyebaran kapitalisme. Urbanisasi pada konteks modernisasi membawa pergeseran nilai dari orientasi tradisional ke orientasi kontemporer, yang mengakibatkan diseminasi modal, teknologi, nilai, manajemen kelembagaan, dan arah dari masyarakat tradisional ke dunia Barat (kota).

Urbanisasi adalah proses alami yang terjadi seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara dan meningkatnya kesejahteraan penduduknya. Adanya konsentrasi penduduk yang tinggi di suatu wilayah yang disebut dengan aglomerasi merupakan hal yang harus diperhatikan atau dihindari sehubungan dengan urbanisasi.

2.4 Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU no 1 tahun 2011 tentang permukiman, permukiman kumuh merupakan permukiman atau tempat tinggal tidak layak untuk ditinggali karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi dan kualitas bangunan yang tidak sesuai syarat (Harun & Haras, 2019). Permukiman kumuh adalah masalah yang harus diselesaikan. Permukiman baru perlu dibuat untuk kelompok ekonomi kurang beruntung yang ada di kota-kota berkembang, yang secara langsung terkait dengan pengadaan perumahan. Permukiman kumuh ditangani dengan berbagai cara. Langkah-langkah pemerintah, termasuk skema bantuan dana keuangan, telah diberlakukan dalam bentuk bantuan perbaikan rumah, bantuan tunai untuk Pembiayaan bagi pengusaha. Program-program yang ada sejauh ini gagal memperbaiki situasi keadaan saat ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa pembuat kebijakan tidak memiliki keahlian dan kurang memahami permasalahan yang ada terkait permukiman kumuh, dan penanganannya hanya dilakukan sebagian, sehingga belum tuntas dan akan menimbulkan masalah baru.

Dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yakni Aspek kebijakan, masyarakat yang menjadi sasaran, pelaksana dan faktor lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan jenis kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penggunaan studi kasus dengan tujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih dalam terhadap implementasi kebijakan pemukiman kumuh di kawasan pinggir sungai di Kecamatan Asemrowo. Analisis yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan setelah kejadian berlangsung. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan jurnal ini sudah jelas serta sudah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu penulisan jurnal ini dibuat berdasarkan asumsi dan merupakan tulisan pribadi yang mengandalkan cara berfikir kritis penulis dan bukan berbasis riset.

3.2. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan pernah dipublikasikan sebelumnya. Pada penelitian ini penelitian bersifat kualitatif. Data sekunder dari jurnal ini bersumber dari beberapa jurnal ilmiah mengenai kebijakan permukiman, urbanisasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Selain itu penulis juga menggunakan data yang dipublikasikan pemerintah daerah lewat website resmi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengamati dan memahami serta juga menganalisis dokumen, jurnal yang sudah

dipublikasikan sebelumnya. Dokumen dan jurnal tersebut berisi data dan analisis kebijakan dan cara dalam mengatasi permukiman kumuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Asemrowo adalah salah satu kecamatan di kota Surabaya yang terletak di kawasan Surabaya Pusat. Pada kecamatan Asemrowo mayoritas bangunannya adalah permukiman penduduk. Salah satu permukiman penduduk yang ada di Jalan Kalibutih, Kelurahan Asemrowo terdapat permukiman yang letaknya berada di pinggir sungai. Permukiman ini berbatasan langsung dengan bibir sungai, dan juga bersebelahan dengan kuburan. Letak bangunan rumah penduduk yang terlalu mepet dengan sungai membuat permukiman ini rawan akan bencana seperti banjir, dan tanah yang amblas karena tergerus air sungai.

4.1. Analisis Indeks Jawaban Responden

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan 4 aspek indikator pada teori Adam Smith dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yaitu :

a. Program (Kebijakan yang akan dilaksanakan)

Menurut hasil dari pengamatan peneliti program yang dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan pemerintah secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota /kabupaten, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari program ini yakni untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, yang mana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya.

b. Target Groups (Kawasan/daerah yang menjadi sasaran)

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan juga terukur. Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh, yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai di jalan Kalibutih Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo. Hal ini sesuai dengan SK Walikota Nomor 188.45/143/436.1.2/2015 tentang kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman Kota Surabaya dengan Kecamatan Asemrowo menjadi salah satu kawasan yang menjadi target program pemerintah.

c. Pelaksana kebijakan

Pada pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Dalam penanganan permukiman kumuh, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menggunakan manajemen strategi. Strategi yang digunakan nantinya akan diimplementasikan di Kelurahan Asemrowo. Namun tak jarang penanganan permukiman kumuh ini mengalami kegagalan. Hal tersebut karena cara pandang penyelesaiannya masih terfokus pada penataan spasial permukiman kumuh yang mengabaikan hak atas papan dengan tanggung jawab pemangku kepentingan.

d. Faktor lingkungan

Kawasan Asemrowo mayoritas bangunannya adalah rumah penduduk. Namun di beberapa titik di Asemrowo terdapat beberapa permukiman kumuh yang letaknya berada di pinggir sungai seperti yang ada di jalan Kalibutih. Sehingga Kecamatan Asemrowo masuk ke dalam kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pengamatan antara rumah penduduk dan bibir sungai tidak memiliki jarak bahkan sangat dekat dengan sungai. Hal tersebut sangat membahayakan dan rawan terjadi bencana apabila debit air sungai meningkat sehingga menyebabkan banjir. Namun masyarakat yang tinggal di pinggir sungai tidak ikut mendukung program penanganan kumuh ini. Walaupun tinggal di daerah perkotaan namun pola pikir masyarakat masih tidak memperdulikan lingkungan, kebersihan dan kesehatan.

Faktor yang mempengaruhi penanganan permukiman kumuh

Penanganan permukiman kumuh tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambatnya sebagai berikut :

1. Masyarakat yang kurang memahami tentang bahaya permukiman kumuh dan letak tempat tinggal dan tidak mensupport pemerintah dalam program kebijaksanaan dan penanganan.

a. Adanya bangunan ilegal

Bangunan ilegal masih banyak ditemui di beberapa titik kawasan di Kota Surabaya. Salah satunya di Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini kebanyakan adalah masyarakat pendatang dari luar Surabaya dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah sehingga masyarakat tersebut tidak mampu membeli rumah di permukiman/perumahan yang layak huni.

b. Masih kurangnya partisipasi dari masyarakat

Kurangnya masyarakat yang ikut terlibat menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan program ini. Kemampuan program untuk mencapai tujuannya sebagian besar tergantung pada lingkungan sekitar. Komunitas berfungsi sebagai populasi sasaran dan merupakan kelompok yang akan paling terpengaruh oleh hasil.

c. Pola pikir masyarakat

Kebanyakan masyarakat masih memiliki pola pikir yang tidak maju. Masyarakat masih tidak memiliki

pemikiran dan kesadaran tentang kebersihan serta bahaya dari tempat tinggal mereka yang berada di kawasan kumuh. Program kebijakan penanganan permukiman kumuh pun tidak dipedulikan oleh masyarakat, karena masyarakat berpemikiran bahwa program ini sama saja seperti program kebijakan lain yang tidak berjalan dan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

2. Anggaran

Masalah pendanaan juga menjadi salah satu faktor penghambat dari penanganan permukiman kumuh. Kesulitan yang dialami adalah pencairan dana dari anggaran APBD tidak semulus yang diharapkan. Dana yang akan digunakan untuk penanganan permukiman kumuh pun tidak tercukupi sehingga program, kebijakan dan pembangunan yang akan dijalankan tidak dapat terlaksana.

3. Pembebasan lahan dan relokasi masyarakat

Pada kasus ini, sebagian masyarakat tidak mau jika lokasi tempat tinggal mereka digusur dan masyarakat juga tidak mau jika di relokasi ke tempat seperti rumah susun. Alasannya adalah karena letak rumah susun berada di pinggiran dan jauh dari pusat kota. Masyarakat sendiri juga sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

4. Kurangnya koordinasi

Dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh terdapat hambatan salah satunya adalah koordinasi/komunikasi antara pemerintah dan jajarannya dengan masyarakat. Koordinasi yang masih kurang baik antar lembaga membuat pelaksanaan penanganan permukiman kumuh menjadi terhambat dan menimbulkan masalah baru yang membuat pelaksanaan menjadi terganggu.

Solusi dan kebijakan yang dapat mendorong penanganan permukiman kumuh

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di kelurahan dengan memberikan penjelasan mengenai program kebijakan penanganan permukiman kumuh, menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari permukiman kumuh. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari program kebijakan yang akan dijalankan pemerintah.

2. Memberikan bantuan dana

Bantuan dana yang diberikan pada masyarakat nantinya akan digunakan untuk mengubah kawasan permukiman yang kumuh menjadi lebih bersih dan tertata. Selain itu bantuan dana juga dapat digunakan masyarakat untuk merenovasi tempat tinggal mereka agar lebih bagus dan layak untuk ditinggali

3. Merelokasi masyarakat

Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dapat direlokasi oleh pemerintah. Nantinya masyarakat yang direlokasi dapat tinggal di rumah susun, atau perumahan dengan harga murah yang disiapkan oleh pemerintah. Walaupun pelaksanaan dari kebijakan ini tidak mudah.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam penanganan permukiman kumuh sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan melibatkan masyarakat serta lembaga lembaga pemerintahan. Namun implementasi program dan kebijakan di Kelurahan Asemrowo yang menjadi target sasaran belum berjalan dengan baik. Selain itu terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mengatasi permukiman kumuh seperti letak lokasi permukiman yang sulit dijangkau, keterbatasan dana dan lainnya. Kawasan permukiman Asemrowo belum dilakukan penanganan dan kebijakan yang diterapkan karena pemerintah lebih fokus dalam penanganan permukiman kumuh yang berada di pinggiran kota.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian permukiman kumuh adalah suatu masalah yang harus segera diatasi. Mengingat Kota Surabaya telah dianggap berhasil dalam mengatasi permukiman kumuh. Tujuannya agar tidak mencoreng nama baik Kota Surabaya, dan semakin mempercantik tata letak bangunan di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieffiani, D. (2014). Kebijakan pembangunan perumahan pemerintah kota surabaya dan konsistensi terhadap pemanfaatan lahan. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 7(1), 45-60.
- Dylan Trotsek. (2017). Perumahan Dan Permukiman. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9, 23–76.
- Harun, N. I., & Haras, K. T. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal of Public Administration Studies*, 2(1), 41–51.
https://www.kompasiana.com/maypuspitas/5ec3908e097f3635a440b233/penanggulangan-permasalahan-permukiman-kumuh-dengan-manajemen-strategi-melalui-program-kotaku?page=3&page_images=1
- Kartika Puspa Dewi, V. A. K. & R. L. . S. (2019). Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria Eco-Settlement Di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado. *Spasial*, 6(1), 169–177.
- Putri, C. M. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Soesilowati, E. (2007). Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban. *Dinamika*, 16(1).
- Wulan, N. D. N. Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(2), 84-98.

